DASAR-DASAR PENDIDIKAN SAINS UNTUK GURU-GURU PESERTA PELATIHAN DALAM JABATAN

Latar belakang dan permasalahan

Berbagai uapaya peningkatan kualitas pembelajaran terus dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk meningkatkan lulusannya. Salah satunya adalah dengan mengikut sertakan guru-guru dalam berbagai pelatihan, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya termasuk peningkatan kualifikasi akademik melalui jenjang pendidikan lanjutan. Keragaman kualitas guru yang memenuhi persyaratan untuk mengajarkan satu mata pelajaran di sekolah-sekolah sangat bervariasi baik dilihat dari keragaman kualifikasi akademik guru maupun kesesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diampunya. Keadaan ini semakin parah untuk sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Departemen Agama, terutama bagi sekolah atau madrasah yang ada di kota kecil atau pelosok perkotaan.

Salah satu terobosan yang dilakukan Departemen Agama yaitu dengan mengikutsertakan guru-guru yang mengajar di Madrasah dengan kualifikasi akademik yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lanjutan (S-2) di berbagai Perguruan Tinggi seperti IPB dan Universitas Indonesia. Bagi guru-guru yang tidak memenuhi persyaratan kesesuaian latar belakang pendidikannya dengan mata pelajaran yang diampunya diharuskan untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan maple yang diampunya, disebut Strata 1 (S-1) kedua. Sayangnya program ini adalah program yang kurang dipersiapkan dengan baik.

Beberapa alasan yang mendasari anggapan kurang dipersiapkan dengan baik adalah:

1. Tidak ada saringan khusus yang dilakukan oleh perguruan tinggi penerima (dalam hal ini UPI) untuk menyeleksi peserta berdasarkan latar belakang pendidikannya. Kebanyakan peserta program ini adalah dari Sekolah Tinggi Agama Islam dengan fakultas yang berbeda seperti Tarbiyah, Ushuludin, dsb.
2. Keadaan atau kondisi guru dianggap sama (dengan alas an sudah S-1) karena mereka menerima perlakuan yang sama dengan kurikulum (kalau layak disebut kurikulum) yang sama. Keadaan ini akan mempersulit apakah program ini akan berhasil, merupakan pertanyaan yang sulit dijawab atau dengan kata lain keberhasilan program diragukan.
3. Penyusunan kurikulum tidak berdasarkan kepada analisis kebutuhan dari peserta tetapi disusun menurut perkiraan saja tentang hal-hal yang diperkirakan diperlukan, padahal selain latar belakang guru yang berbeda, tingkatan sekolah tempat mereka mengajar juga berbeda. Tentu kebutuhan guru dengan kondisi seperti itu akan berbeda walaupun mereka sudah mengajar.
4. Kalau program ini dianggap program “gelar” kedua, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, diantaranya: Dianggap setara program apakah para guru peserta program ini (D-2 atau D-3)? Apakah jumlah sks sudah memenuhi? Apakah untuk program S-1 cukup dengan membuat koloqium/makalah? Standar kelulusan mana yang digunakan? Apakah

dalam setiap semester (program 3 semester dipadatkan) jumlah > 20 sks diperbolehkan? Bagaimana dengan aturan program regular UPI sendiri yang sudah dituangkan dalam peraturan? Apakah kita sendiri akan melanggar aturan yang sudah kita buat? Apa jadinya kalau program regular menuntut aturan yang sama tentang jumlah sks dan penyelesaian tugas akhir/skripsi? Apakah 3 semester dianggap cukup? Apa dasarnya?

5. Dasar apakah yang digunakan dalam menentukan matrikulasi? Apa tujuannya? Apa perlu semua mata kuliah? Dasar apakah yang digunakan untuk menentukan jumlah pertemuan matrikulasi?
6. Pertanyaan yang paling mendasar di hati adalah: Apakah kita rela melepaskan mereka menjadi lulusan kita dengan keadaan seperti itu? Bagaimana dengan mahasiswa yang reguler? Dimanakah letak keadilan kita selaku pendidik memberikan gelar yang sama dengan perlakuan yang berbeda?
7. Kalaupun benar tentang issu bahwa guru-guru peserta program jika lulus tidak dapat melanjutkan ke S-2 siapa yang akan mengawasi dan menjamin itu tidak terjadi padahal program S-2 di Perguruan Tinggi Swasta sudah banyak?
8. Apakah dosen-dosen sudah memiliki strategi khusus untuk melaksanakan program ini?
9. Mudah-mudahan program ini tidak menurunkan harga diri UPI, khususnya FPMIPA.
10. Program ini selayaknya non gelar dan hanya diberikan keterangan pelatihan.

Alternatif pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan program pelatihan

Beberapa asumsi:

1. Guru-guru peserta pelatihan sudah memiliki pengalaman mengajar yang beragam.
2. Guru-guru peserta pelatihan sudah memiliki pola/kebiasaan mengajar yang sudah mapan (sulit diubah)
3. Mengadakan perubahan bagi peserta pelatihan yang tanpa pengalaman lebih mudah dibandingkan dengan peserta yang sudah memiliki kebiasaan/pola masing-masing.
4. Belajar akan lebih berhasil jika mengikut sertakan peserta dalam proses belajar itu sendiri secara aktif dan mengonstruksi sendiri konsepnya (prinsip konstruktivisme)
5. Guru peserta pelatihan adalah orang dewasa sehingga di dalam metode penyampaian harus mempertimbangkan prinsip pembelajaran orang dewasa (androgogi)
6. Pengalaman guru mengajar dapat dimanfaatkan dalam pelatihan.

Pendekatan alternatif dalam pelatihan

Dengan memperhatikan asumsi di atas maka perlu dilakukan pendekatan alternative, salah satunya adalah dengan mem”*blended*” antara materi yang

diajarkan/dilatihkan dengan aspek pedagogi di dalam kelas. Alurnya seperti berikut:

Pengalaman mereka mengajarkan ---------- teorisasi (teori, penalaran peserta mengapa mereka mengajarkan seperti itu) ---------- pemberian materi dengan aspek pedagogi ---------- pemeberian teori-teori belajar dan mengajar--------- percontohan mengajar dengan menggunakan teori dan prinsip mengajar yang semestinya ----------menemukan kesenjangan antara pembelajaran yang biasa dilakukan dengan yang semestinya---------- penyusunan RPP untuk mengajar ----------tampilan mengajar termasuk penguasaan materi ajar di dalamnya.